

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Menurut Meir dalam Richardson (2001) mendefinisikan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses dimana suatu Negara/wilayah mampu meningkatkan pendapatan perkapita penduduk selama kurun waktu yang panjang dengan melihat bahwa jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan *absolute* tidak meningkat serta distribusi pendapatan tidak makin timpang.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi dan non ekonomi. Oleh karena itu, sasaran pembangunan menurut Todaro (2000) adalah:

- 1.) Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
- 2.) Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu atau nasional.

3.) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain tetapi dari sumber sumber kebodohan dan penderitaan.

Menurut Baldwin Meler tujuan pembangunan ekonomi adalah menaikkan atau memperbesar output nasional dan pendapatan masyarakat. Tujuan ini adalah dalam rangka menunjang tercapainya tujuan pembangunan secara keseluruhan. Adapun tujuan yang lainnya menurut Baldwin Meler yaitu mengurangi kemiskinan, mengusahakan distribusi pendapatan yang merata, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran.

2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan adalah isu pembangunan yang kompleks dan rumit, yang membentuk rangkaian masalah yang saling terkait dan sulit diatasi. Fenomena ini terjadi karena kemiskinan dapat menyebabkan rendahnya akses terhadap pendidikan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kesulitan dalam mencari pekerjaan, pendapatan yang rendah untuk pemenuhan kebutuhan dasar, masalah gizi dan kesehatan yang buruk. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan yang dihadapi oleh hampir setiap negara. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai ketidakberdayaan seseorang atau suatu golongan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar yang layak, meliputi pangan dan non pangan.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse (dalam Lincoln Arshad, 1999), secara sederhana dan umum digunakan dan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1.) Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksud untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

2.) Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk kedalam golongan relatif apabila dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendahnya dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini garis – garis kemiskinan akan mengaami perubahan bila tingkat hidup masyarakatnya berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3.) Kemiskinan Kultural

Seseorang dikatakan termasuk kedalam golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Menurut Kuncoro (2010) adanya kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, adapun sebab – sebabnya:

- 1.) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemikiran sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
- 2.) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah berarti produktivitasnya rendah yang pada akhirnya akan mengakibatkan perolehan upah yang rendah juga. Keadaan kualitas SDM ini diakibatkan oleh rendahnya pendidikan dikalangan penduduk miskin, selain itu ada faktor diskriminasi atau keturunan.
- 3.) Kemiskinan muncul dikarenakan perbedaan akses dalam modal.

Semua penyebab di atas saling mempengaruhi, dan sulit memastikan penyebab kemiskinan yang paling utama atau faktor mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan dari Nurkse. Lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan dimana suatu Negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan dan ketertinggalan sumber daya manusia (yang tercermin oleh tingkat pendidikan yang rendah). Ketidaktepatan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya jumlah

pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya.

Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat beberapa indikator dalam mengukur kemiskinan antara lain:

- 1.) *Head Count Index* (HCI – P0) yaitu presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).
- 2.) Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Proverty Gap Index*, P1) yaitu merupakan ukuran rata – rata kesenjangan pengeluaran masing – masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata – rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- 3.) Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Saverity Index*, P2) yaitu gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka akan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik indeks pembangunan manusia dilihat dari tiga dimensi dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Indeks pembangunan manusia digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut pendapat Sondang (2011) dampak dari terus – menerus menurunnya kehidupan

suatu penduduk, hal ini sebagai akibat rendahnya kualitas hidup manusia itu sendiri. Wilayah dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja yang berkualitas, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, jika indeks pembangunan suatu wilayah itu rendah, maka akan mengakibatkan produktivitas tenaga kerja penduduk tersebut rendah yang akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diperoleh. Hal tersebut akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan tiga dimensi sebagai dasar pengukurannya :

- 1.) Umur panjang dan hidup sehat pengukurannya dengan angka harapan hidup saat kelahiran Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidup sejak kelahirannya. Angka harapan hidup dihitung melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup dalam menginput data ALH dan AMH. Pemilihan Metode *Trussel* dengan model *West*, sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004). Sesuai standar UNDP, Indeks harapan hidup dihitung dengan angka tertinggi sebagai batas maksimum dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

2.) Angka Harapan Sekolah (AHS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS) (Dimensi Pengetahuan). Dimensi pengetahuan sebagai pembentuk IPM diukur melalui indeks tingkat pendidikan. Indikator yang digunakan adalah Rata - rata Lama Sekolah (*mean years of schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (*expected years of schooling*), dua indikator ini diberi bobot yang sama, kemudian digabung dan digunakan sebagai komponen pembentuk IPM.

Harapan lama sekolah adalah lamanya bersekolah (dalam tahun) yang diharapkan mampu dilalui oleh anak atau penduduk berusia 7 tahun ke atas pada yang akan mendatang. Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang dalam bentuk lamanya pendidikan (tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak (penduduk). Harapan lama sekolah menggunakan batasan yang disepakati UNDP, batas maksimum adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol) tahun.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas selama atau dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan batasan yang disepakati oleh UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

3.) Dimensi lain IPM adalah standar hidup layak. Secara luas, standar hidup layak menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian. UNDP menggunakan

Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan untuk mengukur standar hidup layak.

Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM, dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Dimensi Kesehatan:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan:

$$Indeks_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$Indeks_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$Indeks_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Sehingga nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Menurut Badan Pusat Statistik pengukuran Indeks Pembangunan Manusia bermanfaat untuk:

- 1.) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat.

- 2.) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara.
- 3.) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.4 Pengangguran

Pengangguran adalah ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka melakukan upaya aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman & Hotchkiss 1999). Secara umum pengertian pengangguran adalah orang yang belum memiliki pekerjaan tetap atau angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Kebutuhan manusia banyak dan beragam, karena itu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang biasa mereka lakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi ini dapat membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah penduduk miskin yang ada.

Pengangguran dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu:

1.) Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Rumus Tingkat Pengangguran Terbuka:

$$TPT = \frac{JP}{JAK} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

JP : Jumlah Pengangguran

JAK : Jumlah Angkatan Kerja

2.) Setengah Menganggur

Setengah menganggur yaitu penduduk atau angkatan kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tidak termasuk yang bekerja sementara.

Menurut Feriyanto (2014) ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat adanya pengangguran antara lain:

a.) Dampak pengangguran terhadap perekonomian:

- Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang.
- Pengangguran tidak mendorong peryumbuhan ekonomi.
- Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai lebih rendah dari pada pendapatan nasional potensial.

b.) Dampak pengangguran bagi individu masyarakat:

- Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.
- Pengangguran menyebabkan kehilangan keterampilan.
- Pengangguran dapat menyebabkan timbulnya penyakit sosial masyarakat.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Todaro dan Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan terus – menerus dan berkelanjutan dalam kapasitas produksi suatu perekonomian. Dalam proses ini, tingkat pendapatan dan output nasional akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Sukirno (2002:25) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar disetiap golongan pendapatan termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*).

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith pembagian kerja adalah titik permulaan yang akan meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Tetapi Adam Smith menekankan bahwa penumpukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja karena sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Menurut Adam Smith apabila pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan, maka pemupukan modal berhenti, keuntungan menjadi minimum, upah berada pada tingkat kehidupan minimal, tidak ada perubahan pendapatan perkapita, serta produksi dan perekonomian menjadi lambat. Sehingga keadaan ini mengakibatkan kesengsaraan makin parah atau kemiskinan meningkat.

Menurut Tarigan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal ini juga menggambarkan

balas jasa bagi faktor - faktor produksi yang beroperasi diwilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer-payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau mendapat aliran dana di luar wilayah.

Rumus Pertumbuhan Ekonomi:

$$R = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

R : Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase.

PDB_t : Produk domestic bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t

PDB_{t-1} : Produk domestik bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya.

Terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu:

- a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Akumulasi modal akan berhasil apabila sebagian pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar output dan penghasilan dikemudian hari.
- b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pada akhirnya membedakan lapangan kerja yang lebih luas lagi serta perlu adanya kesempatan kerja yang lebih banyak.

- c. Kemajuan teknologi adalah hasil cara-cara baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

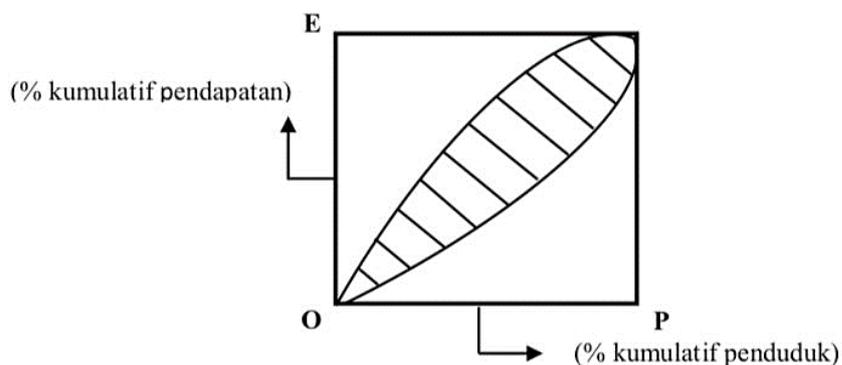
Menurut Smith dan Todaro (2006) ketimpangan pendapatan adalah adanya variasi dalam pendapatan yang diperoleh atau dihasilkan oleh individu dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. Ketimpangan pendapatan dapat disebabkan karena adanya variasi pola pelaksanaan pembangunan ekonomi. Ketidaksamaan pola tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, beberapa wilayah dapat tumbuh dengan cepat sementara wilayah yang lain tumbuh dengan lambat. Akibatnya, wilayah yang kaya cenderung semakin makmur sementara wilayah miskin akan semakin miskin. Ketimpangan yang terjadi di wilayah dapat menjadi masalah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Menurut Hassan Et Al (2015) adanya hubungan timbal balik yang terjadi antara ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan. Dikatakan adanya hubungan timbal balik dikarenakan dalam konteks pembangunan dan pemerintahan ini dibenarkan. Keterkaitan ini berarti bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan memiliki dampak pada tingkat kemiskinan, begitupun sebaliknya. Pada negara – negara berkembang, ketidaksetaraan pendapatan yang tinggi cenderung timbul akibat pertumbuhan PDB yang rendah, yang menyebabkan kesenjangan kemiskinan semakin meningkat. Oleh karena itu, terdapat hubungan positif antara ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui koefisien gini adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Akibat dari perbedaan itu maka akan terlihat kesenjangan yaitu yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan semakin terpuruk.

Rasio gini dikenal juga dengan indeks gini menjadi alat yang digunakan sebagai pengukuran derajat ketidaksempurnaan distribusi penduduk. Hal ini didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan suatu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu seperti pendapatan dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Gini ratio adalah ukuran ketidaksempurnaan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.



Gambar 2 1 Kurva Lorenz

Berdasarkan gambar 2.1 dijelaskan bahwa sumbu horizontal menggambarkan persentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertical menggambarkan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing – masing persentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah disebut “garis pemerataan sempurna”. Karena, setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya, semakin dekat jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Pada gambar di atas, besarnya ketimpangan digambarkan oleh daerah yang diarsir.

Rumus gini ratio:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

Keterangan:

G : Gini Ratio

P_i : Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

Q_{i-1} : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke –i

k : Banyaknya kelas pendapatan

Menurut Sastra (2017), indeks gini membagi tingkat ketimpangan pendapatan menjadi lima tingkat, yaitu:

- 1.) Ketimpangan sangat tinggi (0,8).
- 2.) Ketimpangan tinggi (0,6 – 0,79)

- 3.) Ketimpangan sedang (0,4 – 0,59)
- 4.) Ketimpangan rendah (0,2 – 0,39)
- 5.) Ketimpangan sangat rendah (<0,2)

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan referensi oleh penulis dalam penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Meti Astuti dan Indri Lestari (2018): Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Yogyakarta.	Untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman dan Yogyakarta tahun 2013-2016.	Hasil menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X1) untuk Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan Sleman dan Yogyakarta berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan untuk variabel pengangguran (X2) untuk Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Yogyakarta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan Sleman berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

2.	Suripto dan Lalu Subayil (2020): Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I Yogyakarta Periode 2010 – 2017.	Untuk menganalisis berapa besar pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2010 - 2017.	Hasil menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan dan variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 – 2017.
3.	Sylvia Yasmin (2018): Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2015.	Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007 – 2015.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2015. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2015. Variabel Pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2016. Variabel Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007 – 2016.

4.	Shadrina Rozaan Almira dan Syamsul Huda (2022): Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal serupa juga didapati pada variabel independen tingkat pengangguran terbuka yang dimana memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan hal yang berbeda ditunjukkan oleh variabel jumlah penduduk yang diperoleh hasil yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.	Ari Kristin dan Sulia S (2018): Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia.	Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia.	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan dapat memediasi antara IPM dan kemiskinan. IPM dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui pengangguran.

6.	Saparuddin, M Ari Saptano As'ad Samsul (2019): Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.	Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan model <i>random effect</i> .	Indeks pembangunan manusia berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Kedua, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
7.	Ikke Indrawati, Sudati Nur Sarfiah, dan Rian Destiningsih (2020): Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014-2019	Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Papua tahun 2014 – 2019.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, ada pengaruh positif dan tidak signifikan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat kemiskinan, ada pengaruh negatif dan signifikan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan, dan ada pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan IPM secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua selama tahun 2014 sampai 2019.

8.	R. Bambang Budhijana (2019): Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2000 – 2007.	Bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan pengangguran secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2000-2017.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Variabel pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia
9.	Khoirun Nisa, Ayu Wulandari, dan Rini Luciani (2020): Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 – 2018.	Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009 – 2018.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10.	Ema Dian Ristika, Wiwin Priana Primandhana, dan Mohammad Wahed (2021) Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.	Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur..	Hasil uji menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Baldwin Meler tujuan pembangunan ekonomi yaitu mengurangi kemiskinan, mengusahakan distribusi pendapatan yang merata, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan yang dihadapi oleh hampir setiap negara. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih belum terkendali. Diantara provinsi – provinsi yang berada di Pulau Jawa, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi. Hal ini memperlihatkan kemiskinan masih menjadi masalah bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut pendapat Sondang (2011) dampak dari terus – menerus menurunnya kehidupan suatu penduduk, hal ini sebagai akibat rendahnya kualitas hidup manusia itu sendiri. Kualitas hidup manusia dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia. Menurut Badan Pusat Statistik indeks pembangunan manusia dilihat dari tiga dimensi dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Wilayah dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja yang berkualitas. Berdasarkan komponen yang terdapat di dalam indeks pembangunan manusia, peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh. Selain itu perbaikan dalam kesehatan penduduk yang akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja, apabila hal tersebut terjadi maka akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan pengeluaran untuk konsumsinya, saat pengeluaran untuk konsumsinya meningkat, maka hal

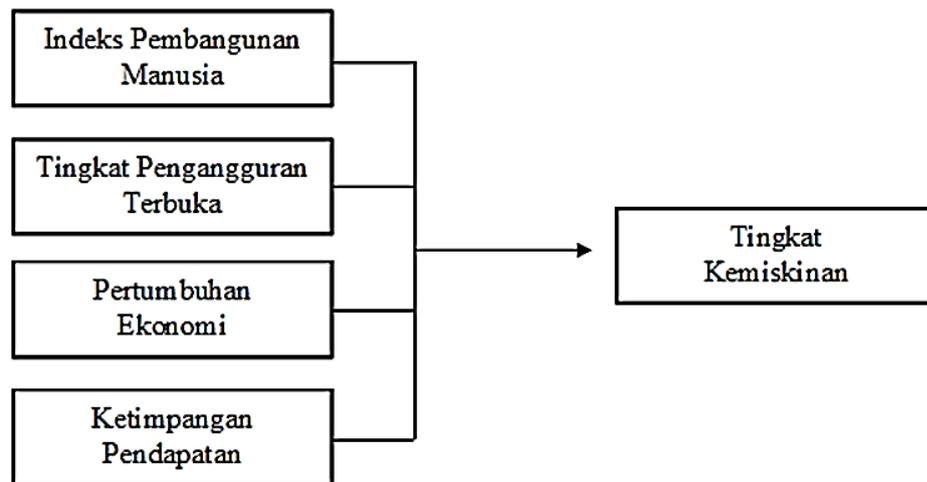
tersebut mengindikasikan tingkat kemiskinan akan menurun. Disisi lain indeks pembangunan manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan. Secara teoritis, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sesuai dengan penelitian Sylvia Yasmin (2018) yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Jika ditinjau dari perseorangan, pengangguran dapat menyebabkan kekacauan pada bidang ekonomi dan sosial. Kebutuhan manusia banyak dan beragam, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Apabila tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi ini dapat membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah penduduk miskin yang ada. Secara teoritis, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Sesuai dengan penelitian Rr. Yuliana Intan Suryaningtyas (2021) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Menurut teori Adam Smith apabila pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan, maka pemupukan modal berhenti, keuntungan menjadi minimum, upah berada pada tingkat kehidupan minimal, tidak ada perubahan pendapatan perkapita, serta produksi dan perekonomian menjadi lambat. Sehingga keadaan ini mengakibatkan kesengsaraan makin parah atau kemiskinan meningkat. Sebaliknya,

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. . Sesuai dengan penelitian Suropto dan Lalu Subayil (2020) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan dapat disebabkan karena adanya variasi pola pelaksanaan pembangunan ekonomi. Ketidaksamaan pola tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, beberapa wilayah dapat tumbuh dengan cepat sementara wilayah yang lain tumbuh dengan lambat. Akibatnya, wilayah yang kaya cenderung semakin makmur sementara wilayah miskin akan semakin miskin. Ketimpangan yang terjadi di wilayah dapat menjadi masalah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut teoritis, ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Sesuai dengan Ikke Indrawati, Sudati Nur Sarfiah, dan Rian Destiningsih (2020) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan tidak signifikan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat kemiskinan



Gambar 2 2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atau dugaan penelitian sebelum penelitian dapat dibuktikan. Adapun hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- 1 Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
- 2 Diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
- 3 Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
- 4 Diduga ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.